

BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Penataan ruang tidak akan terlepas dari proses politik yang begitu dinamis. Hal ini disebabkan ruang menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan berbagai kepentingan politik oleh aktor-aktor terkait dengan studi politik. Penataan ruang sendiri memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah tertentu, perwujudan keterpaduan dan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antar sektor. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Disisi lain penataan ruang akan menarik adanya aktor lain yang ada di luar pemerintahan untuk kemudian terlibat aktif dalam proses terciptanya perencanaan kebijakan serta implementasi kebijakan yang diikuti upaya-upaya pembangunan dengan memanfaatkan ruang yang ada. Keterlibatan ini umumnya di dasari dari rezim yang mampu membuat suatu koalisi dengan aktor lain diluar pemerintah.

Studi politik di Indonesia tentang tata ruang merupakan sebuah studi yang saat ini sedang gencar-gencarnya diperbincangkan oleh berbagai banyak para ahli, khususnya pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam studi ini, tata ruang selalu berkaitan dengan proses-proses politik didalamnya, dimana terdapat keterkaitan antar aktor dalam membuat suatu formula/keputusan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan tata ruang disuatu wilayah. Tidak sedikit tujuan akan keikutsertaan aktor dalam proses penataan ruang yaitu demi mewujudkan berbagai kepentingan masing-masing. Dalam banyak hal/ada kasus, proses penataan ruang kota selalu menyeret beberapa aktor di antaranya adalah aktor/elit politik yaitu pemerintah dan aktor/elit ekonomi (swasta) yaitu para investor. Kedua aktor inilah yang selalu menghiasi proses-proses penataan ruang kota diberbagai wilayah di Indonesia dan saling berkolaborasi antara satu dan

yang lain. Tidak sedikit berbagai macam kebijakan tata ruang serta proses-proses penataan ruang kota terlahir akibat dari campur tangan kedua aktor/elit tersebut.

Wilayah Kedamean pada tahun 2020 menjadi sebuah wilayah yang mulai terlihat penampakan fiskal baru, yang dimana ruang-ruang di wilayah Kedamean mulai bertransformasi. Bermula dengan keadaan maraknya lahan pertanian, pada tahun 2020 ini mulai bermunculan penampakan fisik yang berorientasikan pada pembangunan properti yang mampu menciptakan tata ruang kota baru di wilayah Kedamean. Dorongan pemerintah dalam membuat/merumuskan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Tahun 2030 untuk kawasan GKS tentang pembangunan permukiman berskala besar mampu mendorong aktor bisnis untuk ikut andil dalam memaksimalkan kebijakan tersebut di wilayah Kedamean. Hal itu diperkuat dengan daya tarik TOL SUMO yang berdekatan dengan lokasi Kedamean membuat wilayah tersebut sangat diminati oleh aktor bisnis dalam mengupayakan agenda bisnisnya.

Kecamatan Kedamean merupakan wilayah yang berada pada perbatasan Kabupaten Gresik yang sekaligus berdempetan dengan Kota Surabaya. Sehingga dalam hal ini wilayah Kedamean ikut termasuk dalam golongan wilayah peri-urban, yang dimana dalam hal ini wilayah Kedamean menjadi wilayah hibrida. Hibrida yang dimaksudkan adalah terdapat suatu kenampakan sifat kekotaan dan pedesaan. Adanya luas lahan yang berlebih, serta lokasi yang berada dalam kawasan Kabupaten Gresik dan berdempetan dengan Kota Surabaya, membuat pemerintah Kab. Gresik merespon hal tersebut. Kebijakan menjadi suatu pondasi dan menjadi upaya responsif dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan potensi wilayah Kedamean. Hal ini sekaligus menjadi solusi bagi pelaku bisnis pengembangan properti yang mulai menemui titik buntu akibat dari menipisnya lahan di perkotaan.

Dengan berdempetnya dari pusat perkotaan serta dekat dengan industri, menjadi salah satu keunggulan wilayah Kedamean untuk memancing para pelaku bisnis datang dan berinvestasi, serta melakukan aktifitas bisnisnya. Hal ini tidak

lain diakibatkan oleh adanya fenomena *urbansprawl* di wilayah Surabaya. Fenomena tersebut muncul akibat dari menipisnya lahan, semakin padatnya ruang akibat dari banyaknya aktifitas, serta timbulnya ketidakmampuan Kota Surabaya dalam menampung banyaknya aktifitas penduduk yang terus bertambah, sehingga membuat tuntutan akan ruang sangatlah dibutuhkan. Tingginya nilai lahan di perkotaan, menjadi salah satu faktor pendukung para pengembang untuk melirik wilayah pinggiran, yang dalam kasus ini merupakan wilayah Kedamean.

Wilayah Kedamean merupakan salah satu wilayah pinggiran yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam hal ini, Kab. Gresik sangatlah dikenal dengan ke industriannya. Di sisi lain, wilayah Kedamean yang terletak di pinggiran Gresik, juga menjadi salah satu wilayah yang juga berdekatan dengan wilayah perkotaan. Banyaknya fasilitas umum di wilayah perkotaan, menjadi salah satu penyebab, akan ketertarikan tersendiri bagi para penduduk baik dalam kota maupun luar kota. Fenomena urbanisasi menyebabkan para penduduk wilayah pedesaan berbondong – bondong datang ke wilayah kota guna mengharapkan keberlangsungan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk secara otomatis menyebabkan keberadaan akan ruang untuk membangun permukiman dan prasarana kegiatan sangatlah dibutuhkan dalam mengantisipasi fenomena ini. Dengan didukungnya situasi tersebut, serta keberadaan wilayah Kedamean yang berdekatan dengan lokasi industri menyebabkan wilayah Kedamean menjadi wilayah yang sangat dibutuhkan untuk pemanfaatan ruang demi terciptanya pentaan ruang yang baik. Keberadaan ruang menjadi suatu instrumen dalam berdirinya pembangunan yang dapat di orientasikan pada kesejahteraan masyarakat serta perkembangan wilayah tersebut.

Perkembangan potensi unggulan Kabupaten Gresik pada tahun 2014-2015 antara lain sebagai berikut. Bidang Perindustrian pada tahun 2015 jumlah industri sebanyak 6.653 industri, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 6.525 industri

sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah industri sebanyak 128 industri. Perkembangan industri dilihat dari penerbitan tanda daftar industri (TDI) juga meningkat sebanyak 11 tanda daftar industri. Berikut jumlah industri dan penerbitan TDI di Kabupaten Gresik tahun 2019-2020:

Tabel 1.1 Jumlah Industri Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten Gresik

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri	Industri	6.293	6.369	6.451	6.525	6.653
2	Tanda Daftar Industri	Unit	61	45	25	30	41

Sumber: Sumber: RPIJM Kabupaten Gresik, 2019-2023

Kedua, Bidang Perdagangan, penerbitan SIUP meningkat 19,6% pada tahun 2014 atau sebanyak 264 SIUP. Penerbitan SIUP pada tahun 2018 sebanyak 1.612 SIUP sedangkan tahun 2014 sebanyak 1.348 SIUP. Hal ini selaras dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 yang tercatat sebanyak 175.131 orang atau mengalami peningkatan sebesar 26% dengan penambahan penyerapan sebanyak 36.128 jiwa dari penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 yang mencapai 138.955 jiwa. Sedangkan nilai investasi perdagangan pada tahun 2015 mencapai Rp19.766.408.000,00 atau mengalami pertumbuhan 185% sebanyak Rp12.829.886.000,00 dari nilai investai pada tahun 2014 yang mencapai Rp6.936.522.000,00.

Tabel 1.2 Jumlah SIUP, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik 2011-2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP	229	1.041	1.166	1248	1612
	SIUP Perusahaan Mikro	SIUP		40	178	186	342
	SIUP Perusahaan Kecil	SIUP		761	799	858	968
	SIUP Perusahaan Menengah	SIUP	160	188	170	193	290
	SIUP Perusahaan Besar	SIUP	69	52	19	11	12
2.	Investasi Perdagangan						
	Nilai Investasi	Rp.	367.500.000	907.599.000	2.318.129.600	6.936.522.000	19.766.408.000
	Investasi Tahun Sebelumnya	Rp.		367.500.000	907.599.000	2.318.129.600	6.936.522.000
	Pertumbuhan Investasi	Rp.		540.059.000	1.410.570.600	4.618.392.400	12.829.886.000
3.	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	12.271	11.137	12.253	11.131	175.083

Sumber: RPIJM Kabupaten Gresik, 2019-2023

Keberadaan wilayah Kedamean menjadi salah satu solusi dari dampak terjadinya pemekaran wilayah (*urban sprawl*). Serta dengan adanya situasi tersebut menyebabkan wilayah Kedamean dijuluki dengan wilayah WPU atau biasa disebut dengan Wilayah Peri-Urban. WPU sendiri merupakan daerah pinggiran kota yang memerlukan perhatian khusus karena begitu pentingnya wilayah terhadap peri kehidupan penduduk baik desa maupun kota di masa yang akan datang. Hal ini tak lain disebabkan karena pada wilayah WPU ini, segala bentuk perkembangan fisik baru akan terjadi, dan akan membentuk tatanan

kehidupan kota yang akan mendatang¹. Tidak hanya sebatas itu, wilayah Kedamean yang sekaligus dapat dikenal dengan WPU ini juga turut mengundang adanya fenomena penduduk yang saat ini mulai bermigrasi ke wilayah-wilayah Kedamean. Hal itu tidak lain diakibatkan dari pembangunan di wilayah Kedamean.

Lokasi wilayah Kedamean yang berada di pinggiran Gresik yang dikenal oleh banyaknya aktifitas industri yang juga berada didekat kota Surabaya, menjadikan wilayah ini diapit oleh 2 wilayah besar dengan banyaknya berbagai macam kegiatan didalamnya. Akibatnya dengan masih banyaknya luas lahan di wilayah Kedamean saat ini, sangatlah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnis khususnya dalam menciptakan ruang-ruang permukiman modern yaitu perumahan, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan pembangunan permukiman di wilayah tersebut. Tidak berhenti disitu, dengan masih banyaknya lahan di wilayah Kedamean, serta letak geografis yang diapit oleh 2 kota besar. Tentu hal ini menyebabkan tumbuhnya fenomena penampakan fisik mulai dari industri, infrastruktur, dan juga permukiman modern di wilayah Kedamean.

Dalam pendekatan pembangunan terdapat suatu pendekatan yang dilakukan secara sektoral, seperti sektor pertanian, perindustrian, pertambangan, konstruksi/bangunan, transportasi, pendidikan, pariwisata, dan lainnya². Disatu sisi di wilayah Kedamean sendiri merupakan wilayah yang didalamnya masih terdapat banyaknya aktifitas penduduk yang bertani dan menggantungkan dirinya pada sektor pertanian. Tentu hal ini sangatlah wajar, sebab wilayah Kedamean

¹ Yunus, H Sabari. 2008. *Dinamika Wilayah Peri – Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 1.

² Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 2.

merupakan wilayah yang dihuni oleh 15 desa didalamnya³, yang dimana penduduk desa mayoritas berprofesi sebagai petani. Dalam hal ini, lahan pertanian menjadi salah satu wadah penting bagi untuk profesi mereka demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan selalu membutuhkan lahan, dan fenomena *urbansprawl* menyebabkan bergesernya pembangunan di wilayah wilayah pinggiran.

Keadaan tersebutlah membuat pemerintah kabupaten Gresik memberikan perhatian khusus kepada wilayah Kedamean untuk merangkul/membuat koalisi dengan pelaku bisnis yaitu swasta, dengan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong sektor swasta untuk ikut andil dalam proses menciptakan tata ruang diwilayah Kedamean. Akan tetapi keadaan wilayah Kedamean yang sedemikian rupa (aktifitas penduduk bertani), membuat suatu keniscayaan dengan hilangnya banyak lahan pertanian jika pembangunan dilakukan di wilayah tersebut. Tentu hal ini akan menjadi suatu ketegangan antara pemerintah beserta koalisi dengan masyarakat. Konflik antara mempertahankan lahan pertanian untuk kepentingan sektor pertanian kedesaan dan melepaskan lahan pertanian untuk kepentingan perkembangan fisik baru sektor perkotaan merupakan suatu bentuk konflik pemanfaatan lahan yang sangat mencolok dalam melihat konteks tersebut.

Realitasnya diwilayah Kedamean juga terdapat suatu konflik tentang pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh para pembisnis (swasta) / pengembang, yang juga menyangkupautkan salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Kedamean yaitu Kades Tri Sulono. Dalam konfliknya Kedes Tri Sulono telah menjual tanah negara (GG) seluas 5,8 hektar kepada pengembang PT. Prima Damai Group guna dijadikan sebuah lahan hunian / permukiman modern untuk

³https://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kab.-Gresik&jobs=Kedamean .
diakses pada (18 November 2019) pada pukul 18.23

dipasarkan⁴. Tentu hal ini sangatlah merugikan masyarakat Kedamean. Yang dimana tanah tersebut merupakan tanah negara, dan tidak ada seorangpun yang mempunyai tanah tersebut. Status tanah negara tersebut yang selama ini dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga sebagai tempat akses untuk menuju lahan pertanian yang lain, terpaksa menjadi salah satu tanah yang berkonflik dan diperebutkan oleh pengembang guna melakukan aktifitas bisnisnya. Sehingga menyebabkan suatu keraguan bagi warga Kedamean untuk berocok tanam diwilayah tersebut.

Apa yang dijelaskan diatas serupa dengan apa yang dijelaskan oleh Stone. Dalam padangannya Stone berpendapat bahwa sector bisnis merupakan kepentingan privat yang harus dijadikan partner rezim⁵. Kebijakan tersebut dapat berupa bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat atau juga dapat berupa kepedulian pemerintah dalam sektor ekonomi/kepentingan ekonomi. Keefektifan rezim juga bergantung dengan bentuk kerjasama antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dengan tujuan pemberdayaan. Dengan kata lain, teori rezim perkotaan selalu mengkaikan aktor formal yaitu pemerintah dan juga informal yaitu kelompok bisnis. Namun, penggunaan teori rezim ini tidak harus berkaitan dengan aktor bisnis namun juga bisa berupa aktor-aktor informal lainnya (non-bisnis). Stone berpandangan rezim terjadi akibat dari adanya suatu peluang ataupun tantangan dalam merespon sesuatu yang dinamis demi tercapainya sebuah tujuan.

Hal inilah yang kemudian menarik minat peneliti untuk melihat bahwa “Dinamika Politik Tata Ruang Kota Perbatasan” yang berada pada wilayah Kedamean bukan hanya didasari oleh dorongan dari aktor bisnis ataupun pemerintah kabupaten saja. Melainkan dorongan tersebut berasal dari pemerintah

⁴<http://www.rmoltajim.com/read/2019/08/06/10507/Mantan-Kades-Kedamean-Diduga-Gelapkan-Tanah-Negara-Senilai-Rp-13-Miliar-> di akses pada (18 November 2019) pada pukul 18.31

⁵ Ronal K. Vogel (ed), *Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States*, London: Greenwood Press, 1997, hlm. 7

Kabupaten Gresik yang mampu mendorong aktor bisnis dan aktor lainnya untuk ikut andil dalam memanfaatkan kebijakan yang ditetapkan oleh rezim. Sehingga sinergitas antara aktor pemerintah dan diluar pemerintah merupakan bentuk relasi yang mampu mendorong terciptanya tata ruang di wilayah Kedamean.

Sebetulnya beberapa penulis / peneliti lain juga memberikan sumbangsih pemikiran dibidang politik kota dan juga tata ruang kota. Para penulis tersebut juga berkontribusi dalam penelitian ini. Seperti halnya Wira Yudha Alam, S.Ip.,M.S.M yang dimana dalam tesisnya berjudul “berjudul “Politik Tata Ruang: Relasi Kekuasaan antara Korporasi, DPRD, dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerbitan ijin pengelolaan dan pemanfaatan lahan di kota Surabaya” ia menjelaskan bahwa dinamika relasi antara korporasi, DPRD, dan pemerintah Kota Surabaya terjadi khususnya dalam kebijakan penerbitan perijinan pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh korporasi properti

Korporasi properti telah membangun jejaring kekuasaan baik ditingkat eksekutif maupun legislatif sehingga kepentingan korporasi lebih mudah terakomodasi. Selain itu dampak relasi tersebut maka penataan ruang perkotaan Surabaya lebih mengutamakan kepentingan kapital dari 15 korporasi properti sehingga ruang untuk masyarakat kelas bawah tidak menjadi prioritas kebijakan pemerintah kota⁶. Siti Aminah dalam jurnalnya yang berjudul “Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya”, yang dimana dalam penulisan jurnalnya menjelaskan bahwa Praktik penatan yang ada di Kota Surabaya memperlihatkan dinamika ekonomi-politik⁷. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 1, Januari 2017 tentang “Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Ruang Perkotaan di Kabupaten Gresik” disusun oleh Galang Gerald.

⁶Wira Yudha Alam, Politik Tata Ruang: Relasi Kekuasaan antara Korporasi, DPRD, Dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerbitan ijin pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Kota Surabaya, (Tesis Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2016).

⁷Aminah, Siti. 2015. “Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 20(1):59-79.

Yang dimana ia menjelaskan bahwa model pembangunan ruang perkotaan Gresik didominasi domain ekonomi (economic sentris) yang berbasis pada akumulasi modal industrialisasi⁸.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti di atas dan berdasarkan penjelasan diatas. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang “Dinamika Politik Tata Ruang Kota Perbatasan di Kecamatan Kedamean”. Hal ini didukung dengan minimnya penelitian yang berfokus analisis Dinamika Politik Tata Ruang Kota Perbatasan di Kecamatan Kedamean.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan sebagai bahan acuan penelitian yaitu :

1. Bagaimana kolaborasi antara elit politik dan pengembang dalam pentaan ruang kota perbatasan di wilayah Kedamean ?
2. Bagaimana dampak terjadinya penataan ruang dalam kehidupan masyarakat ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola interkasi/kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Aktor Bisnis yang mampu berupaya menciptakan tata ruang di wilayah Kedamean. Bagaimana kekuatan pemerintah dalam mendorong/menggandeng aktor bisnis sebagai upaya terciptanya tata ruang wilayah di Kedamean dan dampak terjadinya pembangunan dalam proses penciptaan tata ruang wilayah di Kedamean.

⁸ Gerald, Galang. 2017. “Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Ruang Perkotaan di Kabupaten Gresik”. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 1 , Januari 2017.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dilihat berdasarkan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

I.4.1 Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian-penelitian tata ruang kota bagi perkembangan ilmu Politik

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengambilan keputusan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan tata ruang.

I.4.3 Manfaat social

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam memberikan pengetahuan, pemahaman serta wawasan secara langsung tentang tata ruang pada ilmu politik.

I.5 Kerangka Konseptual / Teori

I.5.1 Teori Rezim Perkotaan

Teori rezim merupakan sebuah paradigma yang berkembang dalam menelaah studi perkotaan⁹. Teori rezim menjelaskan terdapat suatu aktor yang saling berinteraksi dan berkolaborasi didalam perkotaan. Aktor tersebut dalam teori rezim yaitu aktor pemerintah dan element non-pemerintah. Interaksi/kolaborasi aktor tersebut muncul pada setiap wacana pembangunan perkotaan yang akan menggambarkan suatu kepentingan didalam kebijakan perkotaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal lain terkait dengan

⁹ David Judge et all. Theories of Urban Politics. London: Sage Pubication, 1998, hlm. 54

adanya kapasitas memerintah yang dimiliki oleh pemerintah¹⁰. Dalam pengamatan biasa teori rezim hampir sama kaitannya dengan pluralism perkotaan klasik yang berpandangan bahwa koalisi berpusat pada eksekutif yang dapat memperlihatkan ciri khas rezim itu sendiri dalam konteks “siapa yang berkuasa”. Tetapi, Analisa teori rezim memandang bahwa kekuasaan sebagai suatu hal yang terfragmentasi. Hal ini disebabkan karena terdapat suatu pembagian kerja antara *country and market*¹¹. Dalam kebijakan pembuatan kebijakan, keberadaan rezim menjadi suatu akomodasi serta sumber daya yang dibutuhkan oleh pemerintah dan non-pemerintah agar memiliki legitimasi dalam menentukan proses pembuatan kebijakan. Kondisi tersebut membuat Stone berpandangan bahwa rezim teori sangat kental dengan prespektif ekonomi politik yang menolak asumsi pluralis yang memandang pemerintah sebagai otoritas yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan secara mandiri, serta asumsi strukturalis yang menyatakan bahwa kekuatan ekonomi menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, analisa yang disediakan oleh *urban regime theory* menurut Stone adalah suatu upaya untuk "mengeksplorasi jalan tengah antara" konseptualisasi rezim sebagai "organisme" yang berada diantara variabel kausal dalam ruang proses dan hasil kebijakan¹².

Rezim merupakan suatu bentuk / pola interaksi antara kepentingan privat dan kepentingan pemerintah dalam proses membuat serta implementasi kebijakan, dengan kata lain Stone berpandangan bahwa sector bisnis merupakan kepentingan privat yang harus dijadikan partner rezim¹³. Kebijakan tersebut dapat berupa bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat atau juga dapat

¹⁰ Allan Darmawan, *Konstansi Politik Kota Dalam Kebijakan Reklame di Surabaya*, Surabaya: FISIP UNAIR

¹¹ Lihat dalam, Mossberger, Karen and Gerry Stoker. 2001. *The evolution of Urban Regime Theory ; the Challenge of Conceptualization*. *Urban Affairs Review*, Vol. 36, No. 6, July 2001. Sage Publications. hal. 810-811

¹² Ibid. 811

¹³ Ronal K. Vogel (ed), *Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States*, London: Greenwood Press, 1997, hlm. 7

berupa kepedulian pemerintah dalam sector ekonomi/kepentingan ekonomi. Keefektifan rezim juga bergantung dengan bentuk kerjasama antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dengan tujuan pemberdayaan. Dengan kata lain, teori rezim perkotaan selalu mengkaikan aktor formal yaitu pemerintah dan juga informal yaitu kelompok bisnis. Namun, penggunaan teori rezim ini tidak harus berkaitan dengan aktor bisnis namun juga bisa berupa aktor-aktor informal lainnya (non-bisnis). Stone berpandangan rezim terjadi akibat dari adanya suatu peluang ataupun tantangan dalam merespon sesuatu yang dinamis demi tercapainya sebuah tujuan. Oleh karena itu, fokus pengamatan yang penting dalam proses yang dikembangkan Stone salah satunya adalah pada proses agenda setting. Hal ini menunjukkan bahwa agenda setting merupakan titik penting yang berpengaruh signifikan pada wujud kebijakan yang nantinya akan dihasilkan. Dalam proses tersebut, Stone menggunakan model dari Tillian tentang koherensi sosial yang rendah dimana tidak ada satupun ideology yang dominan, bahkan ketika mereka mendominasi secara politik¹⁴. Dalam pemahaman ini, terdapat ruang yang sangat terbuka bagi berbagai interpretasi dan pemaknaan atas pembangunan dan kesejahteraan sebagai hal utama yang dilakukan dan ingin dituju dari suatu kebijakan pembangunan dari pemerintah, termasuk pemerintah kota.

Dengan demikian, pemerintahan tidak tergantung pada suatu kontrol tertentu melainkan terkait dengan bagaimana membawa elemen-elemen yang berbeda dalam suatu dunia yang terfragmentasi. Oleh karena itu, formasi rezim sebagian terkait dengan suatu evaluasi dari aktor terkait dengan keuntungan secara utuh maupun tidak dalam suatu format koalisi. Artinya bagaimana aktor-aktor dominan memaknai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagai pilar penting perencanaan pembangunan, bagaimana persepsi tersebut dikomunikasikan dengan aktor lain, dinamika interaksi dan model pendekatan

¹⁴ Nadir, Sakinah. 2018. Rezim Kebijakan Dalam Dinamika Kebijakan Pembangunan Kota. Jurnal politik profetik Volume 6, No. 2 tahun 2018. Hal 255

yang dilakukan oleh para aktor merupakan aspek penting untuk memahami politik perkotaan¹⁵.

I.5.2 Rezim dalam menentukan penciptaan spasial di wilayah peri-urban

Rezim merupakan suatu paradigma yang dapat digunakan dalam menelaah studi perkotaan/perkembangan kota. Dalam hal ini, Rezim selalu menerkaitan antara aktor dalam proses pewujudan serta perkembangan kota. Aktor tersebut dalam teori rezim adalah aktor pemerintah dan juga aktor non-pemerintah. Dalam proses perkembangan perkotaan aktor tersebut saling berkolaborasi antara satu dan yang lain dalam mewujudkan tujuannya, baik dalam pembuatan kebijakan maupun implementasi kebijakan yang akan dihasilkan. Pemerintah sebagai otoritas yang memerintah, mampu menggandeng ataupun menarik aktor diluar pemerintah seperti kelompok bisnis untuk berkoalisi dalam pembentukan kebijakan yang akan dihasilkan. Kebijakan tersebut dapat berupa bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat atau juga dapat berupa kepedulian pemerintah dalam sector ekonomi/kepentingan ekonomi. Dengan kata lain, sector bisnis merupakan sector yang harus dijadikan partner rezim. Keefektifan rezim dapat dilihat dan digambarkan dari hasil pembuatan kebijakan serta implementasi kebijakan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini rezim memiliki suatu peranan penting dalam menciptakan sistem perkotaan yang juga akan mengarahkan pada proses politik didalamnya. Peran tersebut dapat berupa pembuatan, putusan, serta implementasi kebijakan yang dihasilkan di perkotaan. Dengan kebijakan yang dihasilkan tersebut khususnya dalam perkembangan wilayah perkotaan. Rezim mampu mendorong penciptaan ruang/spasial yang tumbuh diwilayah perkotaan. Dorongan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan yang didukung dengan formula perundang-undangan.

¹⁵ Ibid hal 255

Penataan ruang tidak akan terlepas dari proses politik yang begitu dinamis. Hal ini disebabkan ruang menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan berbagai kepentingan politik oleh aktor-aktor terkait dengan studi politik. Penataan ruang sendiri memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah tertentu, perwujudan keterpaduan dan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antar sector. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Disisi lain penataan ruang akan menarik adanya aktor lain yang ada di luar pemerintahan untuk kemudian terlibat aktif dalam proses terciptanya perencanaan serta pembuatan kebijakan berupa implementasi pembangunan dengan memanfaatkan ruang yang ada di perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan wilayah perkotaan sangat membutuhkan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat perkotaan, sedangkan rezim akan muncul ketika terdapat suatu peluang ataupun tantangan yang dinamis demi terciptanya tujuan rezim tersebut.

Wilayah peri-urban merupakan wilayah yang digadang-gadang menjadi wilayah determinan masa depan kota. Hal ini disebabkan karena wilayah peri-urban merupakan wilayah yang terkena dampak langsung dari fenomena *urban sprawl* diwilayah perkotaan. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwasanya wilayah peri-urban merupakan wilayah pinggiran yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sebagai pusat ekonomi yang mempunyai karakteristik hibrida dari sifat kekotaan dan pedesaan¹⁶. Dalam konsep wilayah peri urban menjelaskan bahwa, wilayah perkotaan merupakan suatu wilayah yang di dominasi oleh bentuk pemanfaatan lahan non-agararis. Sedangkan wilayah pedesaan merupakan wilayah yang di dominasi oleh pemanfaatan lahan agraris. Dari segi sosial – ekonomi wilayah peri – urban diidentifikasi dan dilihat dari

¹⁶ Yunus, H Sabari. Op. Cit. hal 9

perilaku sosial maupun ekonomi masyarakat. Menurut konsep ini wilayah peri-urban dari waktu ke waktu akan semakin bertambah luas. Hal ini didasari oleh bertambahnya penduduk dan aktifitas penduduk selalu diikuti oleh peningkatan tuntutan akan ruang yang dimanfaatkannya baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam wilayah ini akan terdapat transformasi berupa penampakan fisik di wilayah tersebut, akibat dari pembangunan

Dalam pembangunan dikenal dengan pembangunan makro dan mikro. Makro yang berarti memiliki cakupan yang lebih luas dengan skala besar seperti menekankan pada agregat pendapatan, investasi, inflasi peredaran uang dan kebijakan moneter, kebijakan fisik (perpajakan), dan perdagangan luar negeri. Sedangkan pendekatan mikro memiliki skala yang lebih kecil misalnya membahas tentang permintaan dan penawaran individu, biaya produksi dan harga pasar atau perilaku seseorang atau suatu perusahaan¹⁷. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada sektor juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan seperti sektor pertanian, perindustrian, pertambangan konstruksi / bangunan, perdagangan, dll.

Sejatinya pembangunan selalu menyeret ruang-ruang yang ada. Dalam hal ini pembangunan selalu menyangku pautkan dengan proses – proses pemilihan tata ruang yang baik guna memberikan dampak yang lebih positif dari pembangunan tersebut. Idealnya pembangunan yang selalu menitik beratkan pada tata ruang ini diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten / Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT), tata ruang pedesaan, tata ruang transportasi dll. Dalam implementasinya pembangunan akan melibatkan interaksi antar beberapa sektor, yaitu sektor utama dengan sektor penunjang dan sektor pelengkap dalam bentuk interkoneksi dan interdependensi yang bersifat lebih intensif dan responsive sehingga memberikan dampak pembangunan yang lebih

¹⁷ Adisasmita, Rahardjo. Op. cit. hal 1

luas bagi pertumbuhan wilayah, yang dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial secara luas. Disisi lain pembangunan selalu mempertanyakan dimana lokasi yang tepat untuk dilaksanakannya pembangunan tersebut, agar mendapatkan hasil yang optimum. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi menjadi salah satu dasar terpenting dalam menjawab dimana pembangunan itu harus dilaksanakan. Beberapa perkembangannya sudah banyak variasi pendapat tentang teori lokasi yang telah dicetuskan oleh para ahli. Yang menjadi perhatian khusus adalah teori lokasi yang di cetuskan oleh Johann Heinrich Von Thunen (1826).

Von Thunen berpendapat bahwa besar kecilnya harga sewa lahan dilihat dari seberapa dekatnya lahan tersebut dari perkotaan. Semakin dekat dengan perkotaan, maka harga sewa semakin tinggi, dan sebaliknya¹⁸. Dalam pembangunan sistem permukiman bukanlah perkara mudah dalam menciptakannya. Beberapa permasalahan kerap terjadi dalam menciptakan pembangunan permukiman, yaitu :

- a. Terbatasnya lahan yang tersedia, sedangkan disisi lain kebutuhan akan tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat memproduksi semakin tinggi.
- b. Rendahnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman seperti air bersih, air limbah, persampahan, drainase, dan penganggulangan banjir, jalan, lalu lintas serta transportasi umum, pasar, dll.
- c. Belum optimalnya sistem penggalangan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana hunian.

Pada dasarnya pembangunan permukiman bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sarana rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, berbudaya, ramah lingkungan dan efisien yang dapat membantu produktivitas dan kreativitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas

¹⁸ Ibid hal 17

sumber daya alam dan kelestarian lingkungan¹⁹. Hal ini tentu memperlihatkan bahwasanya kawasan permukiman baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan, harus ditata dengan baik. Berikut merupakan strategi kebijakan pembangunan permukiman :

1. Mengembangkan sistem penyediaan, pembangunan, dan perbaikan sarana hunian yang layak, murah dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah.
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perkotaan dan pedesaan.
3. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan pedesaan agar tidak berlebihan
4. Meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman antara pemerintah dan masyarakat.

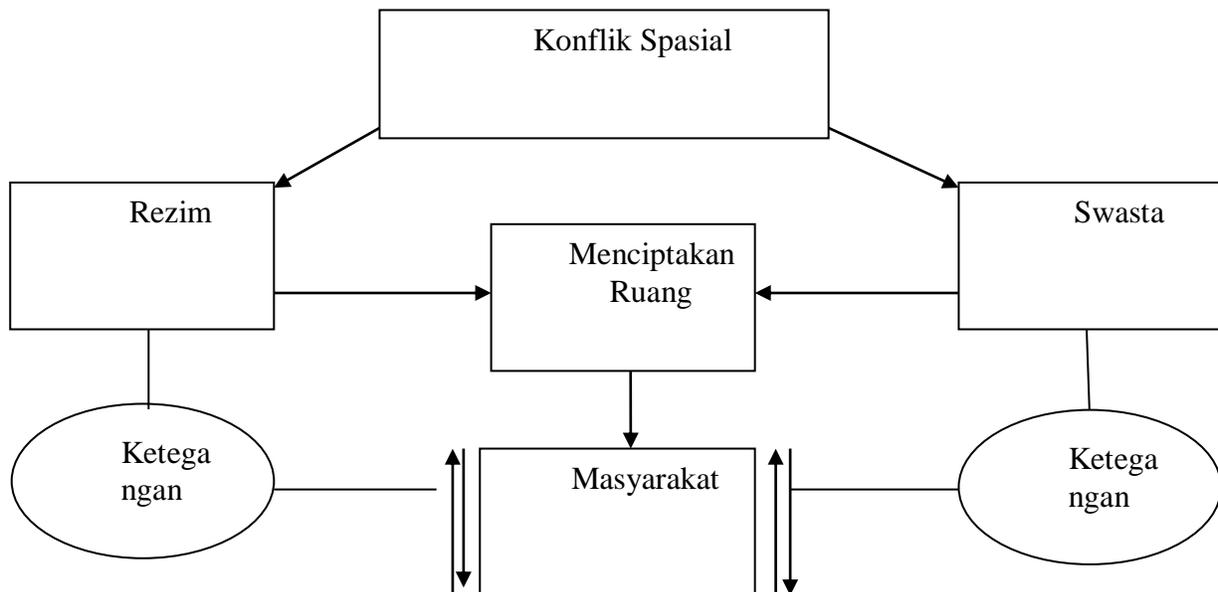
Urgensi pembangunan dan tata ruang dapat terlihat di sini, bagaimana pemilihan akan lokasi yang tepat guna terlaksananya program pembangunan menjadi salah satu pertanyaan yang penting untuk dijawab dan ditentukan lokasinya. Idealnya beberapa rancangan tentang pembangunan di suatu daerah telah tercatat pada beberapa kebijakan yang tertulis dari tiap-tiap daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi (RSTRP), Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten / Kota / Wilayah (RUTRK/W).

Kebijakan tersebut tentu disebabkan oleh campur tangan pemerintah beserta para stakeholder dalam mengupayakan suatu pembangunan perkotaan. Peran rezim menjadi sector sentral dalam menciptakan suatu kebijakan dalam penciptaan/pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan karena kemampuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan mampu mendorong aktor diluar pemerintah turut andil dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

¹⁹ Ibid hal 140

Keuntungan dari kebijakan akan di maksimalkan para stakeholder dalam merampungkan kepentingan ataupun tujuan dari kepentingannya. Didukung dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor diluar pemerintah seperti kelompok bisnis ataupun aktor yang mempunyai suatu kepentingan dalam pembangunan, tentu implementasi dari kebijakan yang dihasilkan akan dapat di realisasikan dalam menciptakan ruang-ruang spasial. Sehingga dapat dipastikan bahwa pembangunan diwilayah peri-urban akibat dari peran rezim / pemerintah beserta koalisinya dalam merumuskan serta mengesahkan kebijakan yang berfokus pada pembangunan diwilayah tersebut.

I.5.3 Konflik Spasial



Penataan ruang tidak akan terlepas dari proses politik yang begitu dinamis. Hal ini disebabkan ruang menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan berbagai kepentingan politik oleh aktor-aktor terkait dengan studi politik. fenomena kontestasi, negosiasi, dan konsensus dapat dipahami sebagai relasi kuasa antara aktor yang saling mempengaruhi dalam proses penataan ruang

seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam pendekatan sosio-spasial aktor pemerintah (nasional – lokal) dan aktor swasta bersinergi dalam membentuk penataan ruang di wilayah perkotaan seperti mengembangkan kawasan industri, real estate, dll²⁰. Menurut Lefebvre ruang itu tidak netral, hal ini disebabkan ruang menjadi alat / instrumen yang dihasilkan dari produk politik bagi perubahan social ekonomi²¹. Hal ini juga menjadikan ruang menjadi alat dalam melestarikan tatanan ekonomi-politik.

Pembangunan selalu membutuhkan ruang. Idealnya pembangunan telah tercatat pada rancangan kebijakan tertulis di tiap-tiap daerah. Dengan asumsi bahwa proses kebijakan pembangunan adalah struktur ruang yang dinamis dengan berbagai kepentingan yang ada didalamnya, maka para aktor akan terus menerus berupaya untuk mengambil “keuntungan” dari struktur rezim kebijakan yang ada. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian pola interaksi yang melibatkan aktor-aktor lain diluar rezim kebijakan kota, misalnya para pengusaha maupun para politisi yang memiliki keuntungan sosial, ekonomi, dan politik baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehadiran kebijakan pembangunan²². Sehingga dalam hal ini kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, juga ikut di maksimalkan aktor diluar pemerintah seperti swasta dalam menciptakan ruang – ruang di wilayah pembangunan. Hal itu dikarenakan pembangunan dilihat sebagai komoditas produktifitas yang dapat mengusung kepentingan mereka.

Sejatinya pembangunan dilakukan guna menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Akan tetapi realitas menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini menjelaskan bahwa didalam pembangunan juga terdapat suatu konflik didalamnya yang melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan beserta koalisinya dengan masyarakat

²⁰ Siti Aminah. 2015. Konflik dan kontestasi penataan ruang kota Surabaya. Masyarakat : Jurnal Sosiologi vol. 20, no.1. hal 60

²¹ Ibid 61

²² Nadir, Sakinah. 2018. Rezim Kebijakan Dalam Dinamika Kebijakan Pembangunan Kota. Jurnal politik profetik Volume 6, No. 2 tahun 2018. Hal 13

yang terdampak dari pembangunan tersebut. Dengan dibutuhkannya ruang untuk pembangunan tentu akan menjadi suatu keniscayaan untuk menghindari konflik mempertahankan lahan. Sehingga transformasi ruang menjadi dampak yang bisa dilihat secara empiris dalam suatu pembangunan

Umumnya konflik spasial dapat dirasakan baik didalam perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Dalam wilayah perkotaan didominasi dengan penampakan fiskal berupa banyaknya permukiman, infrastruktur, pertokoan, apartemen, industri dll. Sehingga tidak sedikit konflik ruang diwilayah perkotaan terjadi akibat dari berubahnya fungsi lahan akibat dari intervensi dari beberapa aktor (politik atau non-politik). Hal ini serupa dengan riset yang dilakukan oleh Dewi Perliana dan Purnama Salura dalam menjelaskan konflik spasial pada ruang public di kota Bandung. Dalam penelitiannya mereka menemukan bahwa konflik spasial diwilayah Bandung tersebut terdapat berbagai macam kepentingan yang disebabkan oleh kontrol privat pada ruang publik melalui intervensi temporer dan permanen, serta konflik spasial akibat kontrol publik pada ruang privat, sehingga menyebabkan ruang – ruang tersebut memberikan dampak terhadap fungsi lahan yang di intervensi²³. Akan tetapi konflik spasial ini sangat bisa dirasakan ketika berada pada wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan karena didalam wilayah pedesaan memiliki penampakan wilayah berupa lahan pertanian, perkebunan, peternakan yang amat tinggi, sedangkan pembangunan fasilitas publik sangatlah minim. Disisi lain harga tanah diwilayah tersebut sangatlah rendah, sehingga membuat para investor yang memiliki ketahanan finansial yang tinggi sangat mudah untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut. Baik dengan cara menyewa ataupun membeli lahan tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi dasar / alat pijakan bagi para investor untuk menjadikan ruang-ruang dipedesaan sebagai wadah produktifitas untuk mengusung kepentingannya. Dengan adanya pembangunan

²³ Dewi Parliana, ² Purnama Salura. 2007. Konflik Spasial pada Ruang Publik Di Kota Bandung Indonesia. Hal 6

akibat dari dorongan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat juga ikut andil dalam memaksimalkan peluang tersebut khususnya bagi para pemilik lahan. Sebab dengan dilirikannya lahan oleh investor, pemilik lahan dapat menukarkan lahannya dengan uang yang akan dijadikan bahan pijakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Disisi lain hal ini berdampak buruk pada buruh tani yang ada diwilayah tersebut. Banyak para penduduk desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani yang terkena dampak pembangunan kehilangan profesinya ataupun beralih profesi akibat dari hilangnya lahan pertanian yang telah di alih fungsikan oleh para investor tersebut. Sedangkan masyarakat yang tidak terkena dampak pembangunan mereka terkena dampak positif berupa keuntungan dengan semakin tingginya harga lahan mereka akibat dorongan dari sinergitas antara pemerintah dan juga aktor bisnis dalam menciptakan penataan ruang diwilayah tersebut.

Dengan dibutuhkannya ruang akibat dari pembangunan serta ruang yang menjadi wadah / instrumen dalam menuangkan berbagai macam kepentingan aktor. Tentu akan menjadi suatu keniscayaan apabila ruang tidak memberikan dampak terhadap wilayah ataupun kehidupan masyarakat. Adanya Transformasi ruang yang menyebabkan alih fungsi ruang menjadi dampak yang bisa dilihat secara empiris. Kebijakan yang dihasilkan oleh rezim / pemerintah menjadi alat pendorong utama dalam terciptanya tata ruang disuatu wilayah memberikan suatu manfaat baik bagi para aktor yang ikut memanfaatkan kebijakan tersebut. Baik aktor pemerintah maupun diluar pemerintah seperti aktor bisnis, serta aktor diluar itu yang ikut memanfaatkan. Dengan adanya Pembangunan tersebut, ketegangan antara rezim/pemerintah beserta koalisinya seperti aktor bisnis dengan masyarakat sangatlah sulit dihindari. Akan tetapi manfaat adanya pembangunan tersebut juga dapat dirasakan oleh pemerintah, aktor bisnis, ataupun masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya fenomena shareholding antara aktor dan juga masyarakat yang menyebabkan ruang menjadi alat dalam melestarikan tatanan ekonomi – politik.

I.6 Metode dan Prosedur Penelitian

I.6.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dinamika politik dalam penciptaan tata ruang kota perbatasan di Kecamatan Kedamean. Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menjadikan partner pihak swasta mampu mendorong terciptanya tata ruang wilayah di Kedamean, sehingga berdampak pada ruang-ruang di wilayah Kedamean.

I.6.2 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data non – angka. Penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduksi atau induksi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena²⁴,

Penelitian yang saya lakukan ini bersifat deskriptif dimana peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala yang terjadi dilapangan yang didukung fakta-fakta faktual. Penelitian deskriptif ini bermaksud untuk mendialogkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan

I.6.3 Metode Pemilihan Informan

Subjek penelitian ini berasal dari elemen kelompok bisnis, pemerintah, masyarakat dan akademisi. Elemen kelompok bisnis yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan para pengembang properti / real estate seperti PT Prima Damai Grup, PT Diamon Park. Elemen pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Gresik, Perwakilan Kepala Desa Belahan Rejo, Camat Kedamean. Elemen masyarakat yang dimaksud adalah Petani beserta Masyarakat umum di Kecamatan Kedamean. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan relevansinya atas permasalahan Tata Ruang Kota Perbatasan di

²⁴ Lisa harison hal 134

Wilayah Kedamean. Penentuan informannya sebelumnya dilakukan dengan meminta informasi kepada pihak – pihak yang memiliki wewenang dalam menciptakan proses tata ruang kota perbatasan di wilayah Kedamean. Pihak – Pihak yang menjadi Informan di antaranya :

1. Arifin, S.E, MM selaku Camat Kedamean
2. Nur Huda selaku Kepala Desa Belahan Rejo
3. Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum selaku akademisi
4. Direktur / Perwakilan dari masing – masing pengembang (PT. Prima Damai Group, PT. Diamond Park)
5. Petani Kecamatan Kedamean / Warga Kedamean

I.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan teliti sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Jika salah dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal yakni berupa data yang tidak memiliki kredibilitas sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, apalagi jika digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Observasi merupakan salah satu metode utama dalam pengumpulan data yang bisa dilakukan oleh peneliti, mesin atau alat elektronik. Di dalam metode penelitian kualitatif, ada beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif, yaitu :

I.6.4.1 Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data secara sistematis dengan cara mengamati keadaan secara langsung di lokasi penelitian guna menggali informasi-informasi berkenaan dengan realitas yang ada di lapangan. Menurut Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

1.6.4.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam adalah tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud partisipan bagaimana menggambarkan dunia mereka dan bagaimana mereka menjelaskan atau menyatakan perasaannya tentang kejadian-kejadian penting dalam hidupnya. Jadi dengan wawancara mendalam maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan metode observasi. Saat wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat bantu berupa *aide-memoire*, yakni daftar ringkasan topik yang akan ditanyakan walaupun tidak dalam bentuk berurutan. Ini menjaga agar wawancara tetap fokus, tanpa mengurangi kelancaran alur diskusi.

Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*). Dimana wawancara tersebut dilaksanakan secara terbuka dan bersifat lentur, serta tidak terstruktur ketat dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama. Peneliti menggunakan *in-depth interview*. Data ini untuk bisa menjelaskan terkait pemahaman individu pada masalah yang diteliti.

1.6.4.3 Dokumentasi

Data dari hasil wawancara terkadang terkadang tidak cukup, maka peneliti perlu menggunakan studi dokumentasi untuk melengkapi dari hasil wawancara tersebut. Teknik ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip. Teknik studi dokumentasi ini misalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (RTRW) tahun 2010 – 2030 dan Rencana Tata Ruang GKS 2010 – 2030. Data dari hasil dokumentasi ini bertujuan untuk mengecek keakuratan hasil wawancara. Selain itu, data yang

diperoleh dari dokumentasi ini juga digunakan untuk memperkuat data-data lainnya.

I.6.5 Jenis dan Sumber Data

I.6.5.1 Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data Primer dan Sekunder. Namun kebanyakan merupakan data Primer, dimana peneliti mendapatkan data secara langsung dari lapangan. Data Primer di dapat lewat teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan, yaitu melalui wawancara. Peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari orang-orang yang memang terlibat langsung.

I.6.5.2 Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari jurnal atau tulisan-tulisan catatan dokumen atau sumber informasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (RTRW) tahun 2010 – 2030 dan Rencana Tata Ruang GKS 2010 – 2030. Perpres no 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

I.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisa data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari catatan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengkajian dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara yang dihimpun untuk memperoleh deskriptif secara utuh tentang Dinamika Politik Tata Ruang Kota di Wilayah Kedamean. Analisa data dalam laporan penelitian ini disusun

pembahasannya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan. Dengan demikian akan diketahui bagaimana bentuk dinamika politik dalam proses tata ruang kota wilayah perbatasan di Kecamatan Kedamean. Penelitian ini menggunakan analisa data model interaktif dari Huberman dan Miles. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan pada umumnya yang disebut analisis:

1. Reduksi data atau data disederhanakan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang penting sehingga harus ada di dalamnya
2. Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan
3. Menyimpulkan data atau memverivikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.